



URGENSI PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH

Kuswan Hadji, S.H.,M.H., Athalla Fikra Yazdaniar, David Fahriza Ali, Aditya Arif Pratama, Revaldo Putra Magantara, Dhimas Arya Kamandanu, Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim

Universitas Tidar

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei 2024

Revised Mei 2024

Accepted Mei 2024

Available online Mei 2024

kuswanhadji@untidar.ac.id,
athallafikra13@gmail.com,
davidfahri06@gmail.com,
prtamaaditya383@gmail.com,
magantara.tn@gmail.com,
aryadhimas440@gmail.com,
nurhisyamfchr2005@gmail.com

Abstract. *The appointment of an Acting Governor is a strategic and crucial step to support the implementation of government programs at the regional level. In certain situations, the Governor cannot carry out his duties suddenly or in the context of a stable transition of power, hence the important reasons or urgency of the appointment of an acting Governor in the implementation of government programs. In this appointment, various considerations will certainly arise related to the positive and negative impacts that will be caused, both in terms of efficiency and effectiveness, certainty of program implementation in accordance with planning, as well as the role and support needed to ensure the continuity and success of government programs at the regional level. Through normative juridical research methods, a very relevant approach in examining the urgency of appointing acting governors from the perspective of administrative law and constitutional law. in carrying out the appointment, there are still pros and cons related to what is the urgency of appointing acting governors, which in its implementation is*

democratic or political.

Keywords: *Urgency, Government, Acting Governor, Program*

Abstrak. Penunjukan Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur menjadi langkah strategis sekaligus krusial untuk mendukung pengimplementasian program-program pemerintah di tingkat daerah. Pada situasi tertentu, Gubernur tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tiba-tiba atau dalam konteks peralihan kekuasaan yang stabil, maka dari itulah lahir alasan-alasan penting atau urgensi dari penunjukan pejabat Gubernur dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Dalam penunjukkan ini tentu akan muncul berbagai pertimbangan terkait dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas, kepastian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan, serta peran dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan kesuksesan program-program pemerintah di tingkat daerah. Melalui metode penelitian yuridis normatif pendekatan yang sangat relevan dalam mengkaji urgensi penunjukan pejabat gubernur dari perspektif hukum administratif dan hukum tata negara. dalam melaksanakan penunjukannya masih terdapat pro dan kontra terkait apa urgensi dari penunjukan pejabat gubernur yang dimana dalam pelaksanaannya apakah sudah secara demokratis atau politik

Kata kunci: Urgensi, Pemerintahan, Pejabat gubernur, Program.



¹LATAR BELAKANG

Pada waktu ini marak terdengar fenomena mengenai penunjukan Penjabat Gubernur sementara yang ada di tiap tiap Provinsi di Indonesia, tentu saja hal ini bukan tanpa sebab dan tentu langkah untuk menunjuk para Penjabat Gubernur adalah suatu langkah strategis yang dipandang pemerintah vital untuk dilaksanakan walaupun terkadang masih terdapat banyak pro dan kontra di dalamnya. Penunjukan Penjabat Gubernur sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Dengan adanya peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 dimana penjabat gubernur diusulkan oleh Menteri dan DPRD melalui ketua DPRD Provinsi.

Menurut pemerintah langkah itu dinilai sebagai suatu instrumen cara sebagai transisi dari pemilu secara mandiri di masing masing daerah menjadi pemilihan suara secara serentak di seluruh Indonesia. Namun karena pada masa sebelumnya pemilihan suara terkhusus yang dibahas adalah pemilihan suara Gubernur tidak dilaksanakan secara serentak maka perlu ada suatu cara untuk menyamakan atau menyerentakan masa pemilihan Gubernur di seluruh Indonesia. Pemerintah lebih memilih untuk menunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada akibat dari habis nya masa jabatan Gubernur, sebab tidak boleh ada kekosongan jabatan yang timbul akibat dari habisnya masa jabatan seorang Gubernur.

Dengan di sisi lain belum dimulainya pelaksanaan pemilu serentak sehingga Pemerintah memilih opsi untuk menunjuk para penjabat Gubernur untuk mengisi jabatan sementara. Namun pengangkatan penjabat Gubernur juga tidak lepas dari masalah adalah penunjukan penjabat Gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga menjadi pertanyaan bahwa dasar apa yang digunakan dalam penunjukan penjabat Gubernur serta sebab dari penunjukan penjabat Gubernur yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka rawan pula terjadi adanya tindak nepotisme untuk menduduki jabatan - jabatan tersebut. Penunjukan penjabat Gubernur juga akan sangat berdampak pada kebijakan serta program pemerintah secara nasional maupun daerah, selain pembangunan pemerataan ekonomi hingga sosial di wilayah tersebut akan terus di kerjakan oleh pemerintah pusat dengan penunjukan penjabat gubernur sehingga Pemerintah harus yakin dengan kompetensi penjabat Gubernur.

Tujuan penelitian disini memberikan sebuah arah dan fokus terhadap apa yang menjadi sebuah tujuan bagi peneliti dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi studi. Adapun tujuan yang telah dirumuskan ialah untuk mengetahui sebuah urgensi pemerintah dalam penunjukan penjabat gubernur dan mengetahui program pemerintah dengan penunjukan penjabat gubernur

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam jurnal ini merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam mengkaji tentang isu penunjukan penjabat gubernur dari perspektif Hukum Administratif dan Hukum Tata Negara. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tersebut didasarkan pada isu hukum actual yang menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru. Pendekatan ini juga memanfaatkan studi Pustaka serta menganalisis masalah politik hukum melalui peraturan perundang undangan, literatur hukum, dan sumber referensi lainnya.

¹ Urgensi Penunjukan Penjabat Gubernur Untuk Mendukung Program Pemerintah



²HASIL DAN PEMBAHASAN

Penunjukan pejabat gubernur tidak jauh dari kepentingan politik nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk beberapa kepentingan pemerintah itu sendiri. Penunjukan pejabat gubernur juga harus dilakukan secara transparansi serta keterbukaan dalam birokrasi. Keterbukaan dalam birokrasi merupakan aspek penting demi terciptanya demokrasi yang substantif. Sejak awal, isu pejabat kepala daerah terutama gubernur telah diwarnai oleh isu-isu yang berkaitan dengan perubahan demokrasi di Indonesia. Publik khawatir dengan pejabat yang membawa kepentingan politik tertentu yang dapat memengaruhi kontestasi Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Pengawasan dari penunjukan pejabat gubernur merupakan salah satu³ langkah dalam menjaga marwah demokrasi dimana sangat rawan posisi jabatan tersebut, untuk dapat dilakukan nya tindakan nepotisme. Pemerintah pusat melakukan urgensi semacam itu untuk beberapa kepentingan nasional terutama proyek proyek nasional yang perlu di rampungkan dan di lakukan pengawasan. Jabatan gubernur juga tidak boleh kosong begitu saja yang menyebabkan perlu adanya peralihan kekuasaan seperti pelaksana jabatan/pejabat gubernur. Pejabat gubernur juga mengemban amanat dari pemerintah pusat terutama dalam mendukung program pemerintah, program pemerintah perlu didukung dan dilakukan pengawalan serta percepatan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa penunjukan pejabat gubernur merupakan urgensi dari pemerintah untuk mendukung program pemerintah.

1. sukseskan pemilu dan pilkada serentak 2024

pejabat gubernur mendukung penuh dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024, pada pelaksanaanya pejabat melakukan koordinasi terhadap walikota serta bupati yang berada di bawah naungan pemprov untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu untuk menciptakan pemilu yang adil, jujur, aman, dan damai. Pemprov juga siap mendukung penyiapan data pemilih, salah satunya dengan menggenjot perekaman e-KTP untuk pemilih pemula. Dalam hal pengamanan, pejabat gubernur berserta pihak nya siap untuk membantu mengarahkan personel satpol pp serta bersinergi dengan TNI dan POLRI untuk melakukan pengamanan dan pengawalan dalam pilkada dan pemilu 2024

2. mensukseskan program pemerintah dalam provinsi tersebut

pemerintah pusat mendistribusikan tugas kepada pejabat provinsi yang lebih mengerti mengenai situasi keadaan tersebut untuk melaksanakan dan mengimplementasikan rancangan program pemerintah pusat yang akan di laksanakan di provinsi tersebut. banyak nya program pemerintah dalam daerah membuat pemerintah memerlukan bantuan pejabat provinsi untuk melakukan peninjauan serta mensukseskan program, terbukti dengan beberapa program pemerintah seperti peningkatan ukm dan umkm, pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting dan gizi buruk, ketahanan dan kedaulatan pangan, kemudahan pelayanan publik dan investasi, sinergi program prioritas nasional dan daerah, dan Stabilitas Sosial, Politik, Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum. Dengan adanya pejabat gubernur, pemerintah berharap pejabat sebagai pemerintah daerah mampu mensukseskan dan melanjutkan program tersebut hingga dapat di rasakan ke daerah.

² Urgensi Penunjukan Pejabat Gubernur Untuk Mendukung Program Pemerintah

³ Urgensi Penunjukan Pejabat Gubernur Untuk Mendukung Program Pemerintah

3. optimalisasi pembangunan dan infrastruktur di daerah

⁴Peranan pejabat gubernur dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. pejabat provinsi lebih mengetahui mengenai keadaan infrastruktur dan pembangunan pada provinsi tersebut sehingga pemerintah provinsi lebih mengerti infrastruktur serta pembangunan apa yang harus di laksanakan pada provinsi tersebut. Banyak nya pembangunan dan infrastruktur di daerah yang di lakukan pemerintah pusat yang menyebabkan pemerintah memerlukan kerja sama dan sinkronisasi terhadap pejabat gubernur terlebih pejabat gubernur di harap mampu melakukan optimalisasi. pentingnya sinkronisasi dalam rencana pembangunan antara pusat dan daerah. Sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga, keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah harus dipikirkan bersama, jadi apa yang telah dibangun itu betul-betul bisa produktif.

4. representasi pemerintah pusat di daerah

pemerintah provinsi berperan sebagai representasi pemerintah pusat untuk hadir di tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah pada provinsi. representasi itu di lakukan agar masyarakat dapat percaya bahwa pemerintah pusat melakukan kinerja dengan baik, pejabat gubernur bertugas sebagai penyambung dari pemerintah pusat untuk merepresentasi pemerintah pusat ke daerah. Representasi pemerintah pusat ke daerah selain melakukan pembangunan dan infrastruktur, pemerintah pusat juga memberikan sebuah bantuan sosial yang dimana itu menjadi representasi pemerintah pusat selama ini. Pemerintah Indonesia secara terus menerus memperjuangkan penyebaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang memerlukan. Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Perlu diingat bahwa bantuan sosial ini disediakan untuk masyarakat yang memerlukan, dan pemerintah akan melakukan penyaluran bantuan sosial dengan transparansi dan akurasi. Penyaluran itu dilakukan pemerintah pusat dengan bantuan kepada pejabat gubernur untuk dapat menyalurkan nya dengan tepat sasaran secara transparansi, dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pejabat gubernur di harap mampu menunjang semua kinerja pemerintah pusat terutama ke daerah.

KESIMPULAN

Saat ini langkah penunjukan pj gubernur dinilai menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mendukung kebijakan maupun program-program yang dilaksanakan di dalam pemerintahan pada skala nasional maupun daerah. Namun langkah tersebut harus diimbangi dengan transparansi atau keterbukaan demi menjamin terciptanya demokrasi yang substantif, serta harus terus-menerus dilakukan pengawasan terhadap pj gubernur dalam masa jabatannya untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan atau penyelewengan yang salah satunya adalah nepotisme. Oleh karena itu, masih diperlukan adanya penyempurnaan terkait langkah

⁴ Urgensi Penunjukan Pejabat Gubernur Untuk Mendukung Program Pemerintah



penunjukkan pj gubernur ini di mana hal tersebut bisa diatasi lewat penunjukkan secara objektif dimana benar benar-benar dilakukan penunjukkan⁵ berdasarkan kualitas serta kemampuan dari individu dan pelibatan secara lebih kepada masyarakat untuk menjadi sektor check and balance dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program yang direncanakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryo wirasto. 2023. Transparansi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Info Singkat Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Lex Renaissance*, 7(2).
- Deliarnoor, N. A. (2015). Problematika Pelaksana Tugas (Plt) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pradan Pasca Pilkada Serentak). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Iqbal Ahmady, Annisah Putri, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim. 2023. Analisis Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh oleh Pemerintah Pusat. *Aceh : journal of governance and sosial policy*
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2).
- Kholik, S. (2018). Kebijakan Menteri dalam Negeri Tentang Persyaratan Pengangkatan Penjabat Gubernur Dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- Laode Harjudin, La Tarifu, Harnina Ridwan, La ode muhammad elwan. 2023. Menggugat Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah : Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat. *Kendari, Sulawesi Tenggara. Indonesia. : Journal Publicho*
- Mahardika, A. G., Fatayati, S., & Furqan, F. N. (2022). Problematika Yuridis Pengisian Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 2(2).
- Nasution, S. R. A., & Sembiring, A. S. (2022). Kewenangan Pelaksana Tugas (Pit) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
- Ramdani, D. (2022). Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

⁵ Urgensi Penunjukan Penjabat Gubernur Untuk Mendukung Program Pemerintah

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 3 No 8, pp 135-145

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Rusdianto Sudirman, S.H, M.H. OPINI: Polemik Penunjukan Pj Kepala Daerah. Pare : File.iainpare.ac.id

Suhaimi, E., & Yasin, M. (2022). Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. Jurnal Hukum Tri Pantang, 8(1).